STUDI KOMPARATIF PERSYARATAN POLIGAMI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 131 AS
No REG : S-2010/AS/131
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh

Wan Hazizul Bin Wan Hamid
NIM : C01206109

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	:	**Wan Hazizul Bin Wan Hamid**
NIM	:	C01206109
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyyah
Judul Skripsi		**Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-Undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
35C86AAF201938598
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Wan Hazizul Bin Wan Hamid
NIM. C01206109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wan Hazizul Bin Wan Hamid ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Agustus 2010

Pembimbing,

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP.196809262000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wan Hazizul Bin Wan Hamid ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progaram sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Imam Buchori, SE.M.si
NIP.196809262000031001

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP.197410252006041002

Penguji I,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991091001

Penguji II,

Abd.Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001120100 2

Pembimbing,

Imam Buchori, SE. M.Si
NIP.196809262000031001

Surabaya,....Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi pustaka yang berjudul "Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan Undang-undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, yaitu:Bagaimana ketentuan persyaratan poligami yang menjadi pedoman masyarakat muslim di Negara bagian Sarawak Malaysia dan di Indonesia, Bagaimana kandungan pasal Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-undang Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Tahun 2001,serta Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua undang-undang tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kandungan kedua undang-undang tersebut. Perbedaan inilah yang dicoba diangkat untuk melihat sejauh manakah efektifitas penerapan undang-undang tersebut dalam masyarakat. Ketentuan persyaratan poligami menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam di Negara Bagian Sarawak dari sudut isi, pengamalan, serta penerapannya sedikit sebanyak mengandung persamaan dan perbedaan dengan kandungan Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia.

Studi komparatif ini akan mengkaji persyaratan undang-undang poligami yang berbeda antara kedua negara tersebut (Indonesia dan Malaysia) dalam mengatur masalah poligami.

Dengan adanya penelitian ini diharapksn menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam pembentukan suatu produk hukum. Sekaligus diharap menjadi lituratur yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi sumber kajian mahasiswa. Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan dari semua pihak supaya segala kekurangan dan kekhilafan dapat dikoreksi dan dibenahi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

BIODATA PENULIS vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Kajian Pustaka. 15

D. Tujuan Penelitian 16

E. Kegunaan Hasil Penelitian 16

F. Definisi Operasional 17

G. Metode Penelitian 18

H. Sumber Data 19

I. Teknik Pengumpulan Data 20

J. Metode Analisis Data 21

K. Sistematika Pembahasan 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM 24

A. Pengertian Poligami 24

B. Poligami Dalam Ruang Catatan Sejarah 24

C. Dasar Hukum Poligami 26

D. Syarat-Syarat Poligami 27

E. Pandangan ulama Fuqaha' terhadap poligami 31

F. Hikmah poligami 33

BAB III : PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 PASAL 21 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM 34

A. Persyaratan poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001

1. Latar Belakang Ordinan 34

2. Pelaksanaan Poligami Menurut Ordinan 38

3. Persyaratan Poligami 50

4. Alasan poligami 53

B. Persyaratan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam 57

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam 57

2. Pelaksanaan Poligami Menurut KHI 62

3. Persyaratan Poligami 66

4. Alasan Poligami 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI..... 72

A. Persamaan antara Ketentuan Persyaratan Poligami Menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 Dan Kompilasi Hukum Islam .....

1. Pelaksanaan Poligami 72

2. Persyaratan Poligami 77

3. Alasan poligami 80

B. Perbedaan antara Ketentuan Persyaratan menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam 82

1. Pelaksanaan Poligami 82

2. Persyaratan Poligami 86

3. Alasan Poligami 90

BAB V : KESIMPULAN 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnahtullah pada hamba-Nya. Dengan tujuan agar manusia mengemudi bahtera kehidupan sebaik mungkin sehingga membentuk keluarga dan keturunan yang *sakinah, mawaddah, warahmah.* Aturan mengenai perkawinan Islam sangatlah penting bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan seperti terpenuhi syarat dan rukun, agar kedepannya bisa dianggap legal dan absah suatu perbuatan tersebut.

Tidak hanya sebatas itu saja, syariat Islam juga menganjurkan kepada penganutnya, supaya mempersiapkan diri dari sudut kemampuan lahiriah seperti mampu menyara nafkah ahli keluarga seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: *"Wahai pemuda-pemuda sekalian, barangsiapa di kalangan kamu yang berkemampuan dari sudut al-Ba'ah maka berkawinlah. Mereka yang tidak mampu berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengurangkan syahwat yang mendesak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya berkawin"[1]

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwal Syakhsiyyah* mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halal melakukan persetubuhan antara seorang lelaki dengan wanita, saling memberi serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua-duanya.[2]

Mengutip amanat yang dimuatkan di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974[3] yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan amanat di dalam KHI mengandung tujuan bahwa perkawinan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*

Dengan nada yang sama diberikan oleh Wahbah Zuhaily tentang perkawinan yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syari'i agar seorang lelaki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.[4] Semua orang menginginkan tujuan-tujuan tersebut terwujud sehingga sebelum memasuki ke alam pernikahan mereka hendaklah memperhatikan hal-hal yang seharusnya

---

[1]Ibn Hajar al-Asqalani, *Fataha al-Bari Bi Syarhi al Bukhari*, (Kaherah, Maktabah al Kuliyyat al Azhariyyah, ,1978), 90

[2]Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Syakhsiyyah*, (Beirut, Maktabah al Ashriyah,1995), 19

[3] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007*, (Wacana Intelektual,Cet. I, 2007), 1

[4]Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, juz II, (Damaskus, Darul Fikr,1997), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pertimbangan seperti memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang ia kehendaki. *Trend* terakhir dari perkembangan sosial masyarakat saat ini adalah menuntut dan mempertanyakan kembali segala bentuk tradisi dan ajaran agama yang semakin hari dianggap tidak sesuai dengan masa kekinian[5].

Dewasa ini poligami merupakan isu yang sering menjadi tarikan publik untuk dibahas dan termasuk masalah yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini selain adanya perbedaan dalam menginterpretasi nas berkenaan poligami juga ada perseteruan antara nalar kaum lelaki dengan perasaan kaum perempuan dalam menyingkapi praktek ini. Bagi kaum laki-laki yang dengan lantang mengklaim bahwa poligami merupakan hak mereka sementara kaum wanita pula berkeras hati enggan dimadu dengan berbagai alasan.

Nampaknya terdapat banyak salah anggapan di kalangan orang Islam berkenaan dengan poligami dalam ajaran Islam. Di dalam sebuah jurnal yang berjudul *"Marriage and Divorce under Islamic Law"* dijelaskan seperti berikut[6]:

"Polygamy is actually not a "male right" created or granted by Islam; on the contrary, it was a pre-exiting institution in the Age of Ignorance which the Quran drastically reformed by introducing limitations and condition before it may allowed in a restricted from under certain circumstances, as provided in the under ayat. It should always be remembered that Surat an Nisa 4:3 was revealed men were killed, leaving behind many war widows and war orphans. Even in that situation, the Quran discontinued the then existing practice of unlimited polygamy and commands

---

[5]Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 352

[6]Nik Noraini Nik Badli Syah, *Marriage and Divorce Under Islamic Law,* (Kuala Lumpur, International Law Book Services,Kuala Lumpur,1998), 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monogamy if there is fear of injustice to the wife. Could it be that Islam actually intends to allow polygamy only in emergency situations i.e. in a period immediately following a war which has resulted in many men being killed and leaving behind many women and children who have lost their husbands and fathers and are consequently unprotected and unprovided for?Or even if it is conceded that there need not be a specific national emergency to justify polygamy, the letter and spirit of the Quran is concerned with the welfare of women and children,not with satisfying the lust of men.....".

Artinya: "Poligami bukanlah sebenarnya "hak kaum lelaki" yang dicipta atau dipekenalkan oleh Islam. Poligami merupakan suatu institusi yang telah wujud di Zaman jahiliah, dan Islam telah membawa pembaharuan dan membatasi dengan ketat, serta mengenakan pelbagai syarat sebelum ia boleh dibenarkan secara terbatas dalam keadaan yang tertentu, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat al Quran di bawah. Haruslah diingat bahwa Surat an Nisa' 4:3 telah diturunkan selepas saja peristiwa peperangan *Uhud* yang telah mengakibatkan banyak korban kaum lelaki Islam yang meninggalkan janda dan anak yatim. Sungguhpun demikian, al-Quran telah menghentikan amalan poligami yang tidak terbatasi seperti yang diamalkan pada zaman itu dan memerintahkan amalan monogami jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap isteri. Mungkinkah Islam sebenarnya bertujuan untuk membenarkan poligami hanya dalam keadaan luar biasa saja, yaitu pada waktu selepas berlakunya suatu peperangan yang mengakibatkan ramai lelaki terbunuh dan meninggalkan ramai wanita dan anak-anak yang kehilangan suami dan ayah mereka dalam peperangan itu, dan dengan itu tidak terdapat tempat bergantung untuk memperoleh perlindungan dan nafkah.? Atau kalaupun dikatakan bahwa tidaklah perlu berlaku keadaan darurat terlebih dahulu negara untuk membenarkan poligami, apa yang tertulis dan termaktub dalam al Quran, sebenarnya al-Quran mementingkan kebajikan kaum wanita dan kanak-kanak, bukannya kepuasan hawa nafsu kaum lelaki."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak kajian yang telah dijalankan bersangkutan dengan poligami. Ada yang melihat dari sisi konsepnya, prakteknya, permasalahannya mahupun penyelesaian dan penerimaan praktek ini di dalam masyarakat. Begitu juga ada yang menyoroti apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu ingin berpoligami.

Dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga, tentu saja tidak selamanya berada dalam keadaan yang sempurna sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Terkadang akan terjadi suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kedua pasangan. Misalnya apabila isteri mendapat cacat badan atau suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan mahupun sang isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri apalagi isteri tidak bisa memberikan keturunan. Dalam hal seperti ini, sesuai dengan ruang yang diberikan oleh ketentuan undang-undang poligami, maka suami dapat mengajukan izin berpoligami kepada Pengadilan Agama.

Apapun alasan dan bentuk kajian yang dijalankan, persoalan poligami sangat diperhatikan di dalam Islam. Di dalam surat an-Nisa' ayat (3) Allah s.w.t berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ
وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

٣

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu menikahi dengan mereka), maka nikahilah perempuan(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil[7] (di antara isteri-isteri kamu) maka (nikahilah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman".[8]

Menurut Imam al-Qurtubi, sesuai dengan nama surat ini yaitu surat an Nisa' maka masalah pokoknya adalah mengingatkan kepada orang berpoligami agar berbuat adil terhadap isteri-isterinya.[9] Sedangkan menurut Ibn Katsir bahwa kandungan ayat ini memberantas tradisi kaum lelaki zaman jahiliah yang mengawini isteri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi.[10]

Sedikit berbeda pandangan oleh Maulana Mohammad Ali yang memberi ulasan berikut mengenai Surat an Nisa' ayat 4 : 3 yang dimuat di dalam versi Inggeris:

"It is admitted that the chapter was revealed to guide the Muslim under the condition which followed the battle of Uhud....in that battle 70 men out of 700 Muslims had beenslain and this decimation largely decreased the number of males, who, being the bread-winners, were the natural guardians and supporters of the females. The number was likely to suffer a still greater diminution in the battles which had yet to be fought. Thus many orphans would be left in the charge of

---

[7]Berlaku adil ialah pelakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat,giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. Lihat keterangan di dalam al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama RI (Surabaya:Penerbit Mahkota,Cet V,2001),113

[8]Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 113

[9]Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Al Jami' Liahkami Al Quran al Karim,* (Kaherah, Darul Kitab al Arabi, ,1967), 167

[10]Ibn Katsir, *Tafsir al Quranul Adzim,* Tahqiq:Abdul Aziz Ghanim, Muhammad Ahmad Asyur dan Muhammad Ibrahim al- Banna, (Kaherah: t.t), 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

windows, who would find it difficult to procure the necessary means of support."[11]

Artinya : Adalah diakui bahwa surat ini telah diturunkan untuk memberi pedoman kepada orang muslim dalam keadaan selepas peperangan Uhud...dalam pertempuran tersebut,70 orang laki-laki muslim dari bilangan 700 orang telah terkorban dan dengan itu, bilangan kaum lelaki telah berkurangan dengan banyaknya, kaum lelaki itu merupakan golongan yang menafkahi perempuan. Bilangan kaum lelaki mungkin akan berkurangan lagi di dalam pertempuran yang akan dihadapi selepas itu. Dengan demikian, ramai anak yatim menjadi tangunggan perempuan-perempuan janda yang menghadapi kesulitan menyara diri mereka.

Berkata M.M Ali mengenai poligami[12] bahwa poligami menurut Islam baik teori maupun praktek, bukanlah peraturan yang harus dijalankan. Melainkan suatu jalan keluar, maka poligami merupakan obat bagi penyembuhan keburukan-keburukan dalam peradaban moderen. Selanjutnya poligami yang oleh Islam hanya diizinkan sebagai penyembuhan, banyak sekali yang disalahgunakan oleh yang mementingkan hawa nafsu. Terhadap monogami dan poligami ajaran Islam yang menganut prinsip monogami, tetapi tidak menutup poligami, hanya dinyatakan dengan syarat-syarat yang berat. Dasar dibolehkan poligami di dalam ajaran Islam adalah perikemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat dan bukannya hawa nafsu yaitu[13] :

---

[11]Maulana Muhammad Ali, *The Holy Quran* (Lahore 1973),535, quoted in Asghar Ali Engineer *The Right of Women in Islam* (1992 at p.156)

[12]M.M Ali, *The Religion of Islam*, (terjemahan R.Kaelan C.s, Jakarta 1977), 430-431

[13]Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta, Penerbit Tintamas, 1983),74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam keadaan darurat, umpamanya sesudah perang dimana banyak kaum laki-laki mati dan perempuan menjadi janda.
2. Untuk mencegah pelacuran (prostitusi).
3. Jika dapat berlaku adil dalam soal nafkah, cinta maupun giliran.

Begitu juga pembahasan poligami di dalam kitab fikih klasik menjelaskan bahwa poligami atau beristeri lebih dari satu orang itu diperbolehkan kalau sudah memenuhi syaratnya, yaitu bisa berbuat adil dengan kesemua isterinya.[14]

Berbeda dengan ketentuan poligami dalam kitab-kitab fikih, praktek poligami tidak cukup dengan hanya memenuhi syarat menurut ketentuan fikih semata-mata akan tetapi ada suatu yang lebih diutamakan yaitu seperti yang disebutkan di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang nantinya akan diangkat mengenai persamaan dan perbedaan dalam sebuah persyaratan, khususnya mengenai boleh atau tidak seorang laki-laki berpoligami. Pertama, Ketetapan yang pertama kali diatur di dalam UU Sarawak dijelaskan di dalam Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa: "*Tiada lelaki semasa kewujudan sesuatu perkahwinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah, membuat akadnikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain.*"

---

[14]Muhammad Ibrahim, *Hasyiyah al Bajuri*, JuzII, (Beirut, Darut Kutub, 1999), 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dijelaskan pada ayat Pasal yang sama ayat (2) yang berbunyi:

"Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah UU Sarawak ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Undang-Undang Islam dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 127."

Memahami pengertian di dalam ayat 1 dan 2 Pasal 21 di atas dengan tegas menjelaskan bahwa sebuah poligami adalah tidak dibenarkan sama sekali dilakukan kecuali setelah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dengan secara bertulis daripada pihak Mahkamah Syari'ah.

Begitu juga di dalam ayat kedua UU Sarawak memberi pengertian tegas bahwa sebuah perkawinan poligami yang dilakukan tanpa kebenaran dari mahkamah tidak boleh didaftarkan sebagai sebuah perkawinan poligami yang sah dan legal melainkan jika mahkamah menyatakan poligami yang dilakukan adalah sah dan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Islam yang berlaku dan mahkamah memerintahkan agar perkawinan poligami tersebut didaftarkan. Hal ini bermaksud bahwa kewenangan mutlak dari mahkamah untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah atau tidak menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kedua, ketentuan yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".[15]

Pada ayat 2 di dalam Pasal yang sama menjelaskan bahwa :

"Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII PP No.9 Tahun 1975"[16]

Selanjutnya ayat 3 menyatakan :

"Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama , tidak mempunyai kekuatan hukum".[17]

Ketentuan poligami ini dipertegaskan lagi setelah adanya Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa dalam mengajukan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama secara gabungan. Bahkan di dalam buku tersebut menyatakan, apabila suami tidak mengajukan permohonan harta bersama sewaktu mengajukan permohonan poligami, maka pihak isteri dapat pula mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dinyatakan lagi bahwa apabila kedua-duanya pihak(suami dan isteri)tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama, maka permohonan untuk berpoligami tidak bisa diterima

---

[15]Undang –Undang Perkawinan Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Wacana Intelektual cet. I tahun 2007), 189

[16]*Ibid.* 189

[17]*Ibid.* 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Pengadilan Agama.[18]

Jika dicermati dengan saksama, upaya pemerintah mengadakan undang-undang seperti ini adalah dalam rangka untuk menertibkan praktek poligami itu sendiri agar tidak ada yang dirugikan atau terdzalimi. Upaya ini bukanlah untuk mengharamkan poligami, akan tetapi cara dan upaya agar tidak ada unsur penyalahgunaan oleh pihak suami. Akan tetapi, masih terdapat segelintir mereka yang ingin berpoligami ternyata masih enggan mematuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan. Misalnya yang berlaku di Sarawak menurut keterangan yang diberikan oleh Pegawai Mahkamah Syari'ah Sarawak, Ustad Nasir bin Morsidi pada sesi wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 2010 menyatakan bahwa terdapat calon poligami yang berstatus warganegara Sarawak yang melakukan poligami di luar negeri seperti Indonesia dan Thailand. Salah satu alasan yang diberikan kenapa mereka melakukan poligami di luar negeri adalah dengan alasan peraturan yang ditetapkan begitu ketat sehingga dianggap menyulitkan mereka. Akhirnya mereka mencari cara illegal untuk bisa berpoligami.

Ironisnya adalah ketika seorang yang akan berpoligami melakukan perkawinan kedua tanpa mendapat izin terlebih dahulu daripada mahkamah, maka boleh dikenakan sanksi denda tidak melebihi sebanyak RM 3000 (matauang Ringgit

---

[18]Buku II *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung, 2007), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaysia) yang dinominalkan dalam nilai rupiah sebanyak kurang dari sembilan juta rupiah. Justeru, denda ini bukanlah menjadi suatu yang menjerakan pelaku poligami illegal. Keterangan yang diberikan oleh Wakil Pegawai Pendaftar Mahkamah Tinggi Syari'ah itu juga, serta maklumat yang diperoleh dari institusi berkenaan menyatakan bahwa terdapat beberapa sebab dan faktor poligami warganegara Malaysia terutama yang berasal dari Sarawak melakukan poligami di negara wilayah Indonesia. Hal ini dapat dinyatakan seperti berikut :

a) Kesukaran untuk berpoligami di negara ini.[19]
b) Proses memohon kebenaran mengambil jangka waktu yang lama[20]
c) Sulit untuk mendapatkan kebenaran. Syarat-syarat yang ada dianggap menyulitkan pemohon untuk mendapatkan kebenaran.
d) Pemohon tidak mahu atau enggan untuk memaklumi isteri tentang hasratnya untuk berkawin lain.[21]

---

[19]Di negara bagian Perlis misalnya, kebutuhan dan keharusan untuk mengisi formulir dinilai sebagai suatu kesukaran yang sangat menyulitkan. Lihat Siti Fatimah Abd Rahman, *Poligami di Malaysia: Peruntukan dan Pelaksanaannya,* 152

[20]Di negara bagian Perlis juga misalnya, kelulusan akan bisa diperolehi dalam jangka waktu sebulan. Namun, bagi negeri yang lain, maka berbeda tempoh waktu kelulusannya. Hal ini menyebabkan banyak pasangan pergi ke negara jiran seperti Indonesia dan Thailand untuk berpoligami. Bagi negeri Sarawak pula, kelulusan sangat memakan waktu. Justru bertambah buruk dengan adanya tempoh 14 hari untuk isteri yang sedia ada membuat sebarang gugatan terhadap putusan Mahkamah. Dalam tempoh tenggang waktu tersebut, sebarang bentuk perkawinan tidak boleh dilangungkan lagi. Sekiranya mempunyai gugatan dari isteri, maka kasus tersebut akan disidangkan semula. Maka kelambanan seperti inilah yang membosankan pemohon dan membuatkannya mengambil keputusan berkawin di negara jiran. *Ibid.* 152

[21]Mungkin demi untuk menjaga hati isteri atau mengelak pertengkaran atau untuk mengelak perceraian. *Ibid.* 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Terdapat segelintir pegawai Kantor Urusan Agama yang dianggap menjadi "calo" poligami terhadap warga Negara Malaysia

f) Pelaku(calon poligami) sengaja memalsukan identitas status.

g) Pelaku juga melakukan pemalsuan dokumen

h) Merasa ketentuan peraturan poligami di Sarawak menyulitkan dan ketat

i) Kecewa dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang pernah menolak permohonan mereka. Mereka inilah merupakan golongan yang tidak cukup syarat.

Di dalam konsep penerapan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, kewenangan kebijakan bidang agama termasuk juga di dalam hal hukum perkawinan adalah dibawah bidang kewenangan pemerintah negara bagian masing-masing yang dipisahkan. Hal ini sedikit banyak mengandung persamaan dan perbedaan kebijakan aturan antara setiap propinsi atau lebih dikenal sebagai negara bagian. Khususnya undang-undang yang berlaku di negara bagian Sarawak, poligami diatur di dalam kitab undang-undang yang disebut sebagai UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 di dalam dua seksyen atau dikenal juga sebagai Pasal undang-undang yaitu Pasal 21 dan Pasal 127. Pada Pasal 21 tersebut mengatur tentang syarat serta prosedur yang harus dipenuhi oleh calon poligami diikuti pada Pasal Nomor 127 mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dari deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat muslim di Sarawak untuk bisa berpoligami dengan mengacu kepada UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 seterusnya mengkomparasikan ketentuan tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penulisan ini mengangkat masalah tentang persyaratan poligami dengan judul: **"Studi Komparatif Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan UU Sarawak Bab 43 0rdinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persyaratan poligami di Sarawak Malaysia menurut UU Sarawak bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 ?
2. Bagaimana persamaan persyaratan poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana perbedaan antara kedua undang-undang tersebut tentang persyaratan poligami ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Masalah poligami juga telah beberapa kali dibahas di dalam judul skripsi para Alumni Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Misalnya seperti berikut :

1. Fajar Trisna Amijaya dalam skripsinya yang berjudul "Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan." Di dalam skripsi ini mengetengahkan pembahasan perkawinan untuk tidak. Dan poligami yang dilakukan suami menjadi batal karena sudah ada perjanjian untuk tidak berpoligami.
2. Nasiri dalam skripsinya "Relevansi Syarat Izin Poligami Menurut Pasal 58 ayat (1) huruf A Kompilasi Hukum Islam dengan kitab-kitab fikih yang menjadi referensinya." Di dalam skripsi ini menjelaskan akan titik perbedaan antara kandungan KHI dengan kitab-kitab fikih yang sedia ada.
3. Fathor Rosi dengan judul skripsinya "Studi Analisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami" juag membahas tema poligami berkenaan syarat diterimanya izin poligami adalah dengan pengajuan permohonan Penetapan Harta Bersama.

Beberapa judul dan permasalahan diatas ini nampaknya ternyata jauh berbeda dengan judul dan permasalahan skripsi saya yaitu :

STUDI KOMPARATIF PERSYARATAN POLIGAMI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang ilmiah terhadap rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui secara detail perbandingan antara Undang-Undang yang mengatur masalah poligami di Sarawak Malaysia dan Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisi persamaan maupun perbedaan terhadap kedua-dua undang-undang di Indonesia dan Malaysia.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

   Kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana dan wawasan terhadap pembentukan dan penerapan hukum oleh kedua-dua negara yang menganut hukum yang berbeda.

2. Aspek Praktis

   Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia agar segera mencapai cita negara hukum yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1945 serta memberikan sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang sebuah undang-undang negara lain.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang keliru dalam skripsi ini, akan lebih baik, kalau diperjelaskan terlebih dahulu definisi sebuah konsep dan variable dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang harus didefinisi secara operasional adalah sebagai berikut :

1. Komparatif adalah suatu analisa yang berdasarkan perbandingan[22]
2. Persyaratan adalah merupakan sebuah proses prosedur yang harus dipenuhi
3. Poligami adalah secara umum dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami dapat mengawini lebih dari satu isteri. Dalam hukum Islam, poligami diatur dan diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki jika ingin berpoligami.[23]

---

[22]Kamus Dewan Edisi Keempat,Terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka,(Kuala Lumpur, 2005), 809

[23]Siti Musdah Mulia,, *Islam Menggugat Poligami*, (Pt.Sinar Grafindo,Jakarta, Cet. Pertama, 2008), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ordinan adalah suatu bentuk perintah, peraturan, dan sebagainya oleh sesuatu pihak penguasa(yang berwewenang), sama artinya dengan undang-undang.[24]
5. Negeri Sarawak merupakan salah satu negara bagian Malaysia yang terletak di Malaysia Timur
6. Kompilasi Hukum Islam atau yang biasa disingkat menjadi KHI merupakan sebuah instruksi seorang Kepala Negara yaitu Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 yang isinya terdiri :
   a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
   b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
   c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data berikut :

a. Data tentang persyaratan poligami menurut ketentuan undang-undang poligami di dalam UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam

---

[24] Kamus Dewan Edisi Keempat, 1103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang berkaitan dengan persyaratan poligami yang melibatkan lituratur kedua-buah negara termasuk juga kitab fikih.

2. **Sumber data**

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dari sumber data berikut :

a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data primer, yaitu subjek penelitian secara langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Antaranya[25]

1) Dokumen resmi seperti kitab Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001

3) Perumusan Kompilasi Hukum Islam karya Mahfud MD

4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Abdurrahman

5) Kompilasi hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional karya Cik Hasan Bisri

b) Sumber data sekunder. Penulis memperoleh data sekunder dari bahan pustaka atau lituratur-lituratur artikel tentang hukum yang diperoleh dari internet serta peraturan perundangan yang diteliti, di antaranya

---

[25]Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jurnal-jurnal terbitan Institut Kemahiran Islam Malaysia (IKIM)
2) Analisa poligami menurut perspektif Islam, Karya Zaleha Muhamat
3) *Marriage and Devorce under Islamic Law* tulisan Nik Noraini Badli Syah
4) Isu Syari'ah dan Undang-Undang terbitan Jabatan Syari'ah Universiti Kebangsaan Malaysia
5) Hukum perkawinan Islam karya Rahmat Hakim
6) Hukum perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

a) Studi dokumen

Pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa transkrip,statistik, agenda, majalah dan sebagainya. Kaitan dengan penulisan ini adalah penulis mengkaji kasus poligami yang pernah berlaku untuk memperoleh data yang berhubungan dengan komparasi Undang-undang poligami kedua-dua negara. Data ini kemudiannya dihubungkan dengan lituratur, baik dari lituratur kepustaka, jurnal atau sebuah dokumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Studi komparasi

Yaitu cara berfikir yang membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya atau membandingkan suatu teori dengan teori yang lain. Metode ini penyusun gunakan sebagai metode pokok dari pembahasan skripsi ini dikarenakan judul ini mengangkat sebuah analisa perbandingan.

2. Metode Analisis Data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian komparatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif:

a. MetodeKomparatif Deskriptif Analisis yaitu metode yang memusatkan diri untuk menganalisis suatu perbandingan dan sifat-sifat dari suatu gejala sekaligus menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[26] Semua data yang ada dikumpulkan, diklafikasikan, diolah dan dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian mengenai apa saja persamaan dan perbedaan persyaratan poligami menurut ketentuan undang yang berbeda.

---

[26]Iskandar Wirjokusumo, Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Unesa University Press 2009), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan didalam menjelaskan dan menganalisis penulis menggunakan pola pikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta yang bersifat khusus mengenai persyaratan poligami menurut ketentuan UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dalam bab dan masing-masing babnya terdiri atas sub bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Adalah Pendahuluan. Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data serta Sistematika Pembahasan.

Bab II : Adalah konsep umum tentang Poligami menurut pengertian Hukum Islam, Pengertian Poligami, Poligami dalam Catatan Sejarah, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami, Pandangan Fuqaha Tentang Poligami dan Hikmah Poligami.

BabIII: Adalah mengenai Pelaksanaan Poligami menurut UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001, Persyaratan Poligami Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Sarawak, Latar Belakang UU Sarawak, Pelaksanaan Poligami, Syarat dan Alasan Poligami menurut Ketentuan UU Sarawak, Pelaksanaan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam meliputi Persyaratan Poligami menurut KHI, Latar Belakang KHI, Pelaksanaan Poligami menurut KHI, Syarat Poligami serta Alasannya.

BAB IV: Adalah suatu Analisis Perbandingan antara Ketentuan UU Sarawak bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam, Persamaan isi kandungan persyaratan menurut UU Sarawak dan KHI yang meliputi proses Pelaksanaannya, Persyaratan dan Alasan serta perbedaan isi kandungan persyaratan kedua-dua undang-undang.

Bab V: Kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa yunani; *Polus* yang ertinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin.[1] Artinya poligami membawa pengertian kawin banyak yakni seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu orang. Di dalam bahasa arab poligami disebut *ta'diduz zaujat* yang artinya berbilangnya pasangan. Adapun dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai permaduan.[2]

B. Poligami dalam Catatan Sejarah

Sebelum kedatangan Islam, poligami ternyata sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa di dunia. Di jazirah arab sendiri mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan wanita dewasa dengan pelbagai cara baik melalui harta mahupun kekuasaan.[3] August Fored dalam bukunya *Het Sexueele Stuk* yang dikutip oleh Nadimah Tanjung di dalam karyanya *Islam dan Perkawinan* mengatakan bahwa poligami ini telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif hingga sekarang. Beliau melanjutkan lagi pembahasannya dengan menjelaskan bahwa

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1987, 250

[2]Abd Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prana Media, 2003), 129

[3]Abd Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut sejarah orang-orang yang berpengaruh dari zaman ke zaman mereka sering melakukan poligami. Raja Uganda misalnya yang dikatakan memiliki tujuh ribu isteri dan Raja Solomon yang turut mempunyai isteri sedikitnya tujuh ratus isteri.[4] Dalam tradisi arab Afrika, poligami merupakan warisan adat leluhur orang Afrika bahkan dianggap sebagai norma kelembagaan dalam budaya mereka.[5] Tidak hairan bahwa kebanyakkan umat dan agama terdahulu sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas dari ratusan sampai ribuan isteri tanpa suatu ikatan yang kokoh.[6]

Dengan kedatangan Islam akhirnya membatasi jumlah wanita yang bisa dikawini dalam berpoligami. Bagi kaum lelaki yang libido seksualnya diluar kebiasaan, disamping jumlah yang dibatasi, Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan, penindasan, terzalimi oleh kaum lelaki terhadap wanita. Jadi lahirnya Islam ini adalah rahmat demi untuk mengangkat derajat wanita seperti apa yang diinginkan di dalam filosofis perkawinan.

Pensyariatan agama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan relavan dalam bentuk apapun sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, maka demi kepentingan manusia itu sendiri baik terhadap individual mahupun komunal (masyarakat), Islam membolehkan kawin lebih dari seorang atau yang biasa dikenal

---

[4]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta, Kencana, 2004), 176

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 176

[6]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah poligami.[7] Islam menggarisbawahi batas maksimal poligami adalah empat orang isteri seperti halnya dengan riwayat hadis berikut :

"Sesungguhnya Ghailan as Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh orang isteri, kemudian Nabi S.a.w berkata kepadanya: "Pilihlah empat orang isteri di antara mereka dan ceraikan yang lain".

C. Dasar Hukum Poligami

Berdasarkan hukum asal poligami adalah mubah(boleh).[8] Allah Swt mensyariatkan poligami sampai empat orang isteri dengan berlaku adil kepada kesemua isteri. Jika tidak bisa berlaku adil atau khawatir akan berbuat zalim, maka ia haram melakukan poligami. Allah Swt berfirman di dalam al Quran surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

---

[7]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 113

[8]Wahbah Zuhaily, *al Tafsir al Munir*, Vol I, (Beirut Darut Fikr, 1999), 6668

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al Tafsir al Munir* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil terhadap semua isterinya. Seandainya tidak bisa atau tidak mampu berbuat adil pada isteri-isterinya maka Islam tidak memperbolehkannya melakukan poligami.[9]

D. Syarat-syarat Poligami

Pengertian yang diberikan oleh al Quran adalah memenuhi syarat utama terlebih dahulu yaitu meyakini bahwa dirinya akan sanggup bahkan bisa adil terhadap semua isterinya baik dalam hal pangan, sandang dan papan. Dan barangsiapa yang tidak bisa memenuhi keadilan dalam hal tersebut, maka dia tidak boleh berpoligami[10].

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan dalam perkawinan poligami itu dijelaskan oleh Allah Swt dalam ayat 129 surat an Nisa' :

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

---

[9]Wahbah Zuhaily, *al Tafsir al Munir*, Vol I, 6668

[10]Muhammad Syata, *'Ianah al Talibin*, juz III, (Semarang, Toha Putra, 1995), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Adanya kecondongan hati kepada salah seorang di antara isteri-isteri merupakan suatu yang tidak disenangi Allah swt dan bertentangan dengan kehendak dan prinsip "pergaulan yang baik" yang dituntut oleh Allah dalam ayat sebelumnya. Hal ini turut dipertegaskan di dalam kitab Shahih Imam Buhkari, hadis riwayat dari Abu Hurairah berikut :

Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri dan dia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, nanti di hari kiamat akan berjalan dalam keadaan bahunya miring."

Selain dari ketentuan syarat khusus yang yang disampaikan di dalam beberapa ayat di atas, syarat yang tidak dapat diabaikan juga adalah kemampuan untuk membiaya isteri tersebut seperti nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup lainnya. Kewajiban tersebut berlaku total untuk setiap isteri selama isteri tersebut tidak bersikap nusyuz terhadap suami. Begitu juga suami yang tidak mampu membayar nafkah dan mahar untuk isteri-isterinya juga dilarang melangsungkan perkawinan.

Keadilan yang menjadi prasyarat untuk perkawinan poligami dinyatakan Allah secara umum yang merangkumi kewajiban yang bersifat materi. Sebagian ulama menyepakati tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan nafkah.[11] Namun ulama berbeda pandangan dalam menetapkan batas adil tersebut, apakah sesuatu yang dinyatakan Allah secara umum adalah mencakup kewajiban yang bersifat materi. Akan tetapi ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi dan nafkah.[12] Ulama berbeda dalam menetapkan batas adil tersebut apakah dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang.

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafkah antara satu isteri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Dalam soal nafkah harian(nafkah dalam arti khusus) suami wajib menyamakan antara semua isterinya, Karena itu yang dimaksudkan dalam arti keadilan tersebut. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafkah dengan kebutuhan dan kecukupan isteri, tidak mesti dalam jumlah yang banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhannya.[13]

Demikian pula dalam memberikan pakaian untuk semua isteri-isterinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut di atas. Suami harus pula menyediakan tempat tinggal sendiri-sendiri untuk setiap isterinya. Namun diperbolehkan suami menempatkan beberapa orang isteri dalam suatu ruang rumah kalau semua isteri-isterinya itu menyepakati hanya saja tidak

---

[11]Zakariya al Ansari, *Fathul Wahhab*, juz II, (Beirut, Darut Kutub, 2000), 252

[12]Zakariya al Ansari, *Fathul Wahhab*, juz II, 252

[13]Ibn Qudamah, *Al-Irsyad fi Fiqhil Maliky*, (Beirut Darut Kutub,1992), 305-306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.[14] Tentang kewajiban suami dalam bentuk non-materi, para ulama tidak menjadikannya sebagai persyaratan poligami karena termasuk seuatu yang tidak terukur dan tidak mungkin pula melakukan penyamaan dalam suatu yang tidak terukur tersebut.[15] Suami tidak akan mampu berlaku adil dalam hal ini sebagaimana dinyatakan Allah dalam ayat 129 surat an-Nisa' tersebut di atas. Hal ini diperjelaskan di dalam hadis Nabi dari Aisyah yang berbunyi :

"Adalah Rasulullah SAW melakukan penggiliran di antara kami kemudian bersabda: "Ya Allah, inilah bentuk penggiliran yang bisa aku lakukan dan janganlah Engkau mencela dalam hal yang aku tidak mungkin aku melakukannya. (H.riwayat Imam Muslim).

Para ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai persyaratan karena poligami pada keadilan adalah dalam kesempatan pergaulan di antara suami dengan semua isterinya. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di dalam fikih disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami dan isteri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah.[16] Dengan demikian, secara sederhana *qasm* berarti kesempatan giliran bermalam.

---

[14]Muhammad Syata, *Ianah al Talibin*, juz III, 239

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 177

[16]Abu Syuja' *al Iqna'* , (Surabaya, Pt.Al Hidayah,1990), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban suami menyamakan *qasm* antara para isterinya.

E. Pandangan Fuqaha' terhadap Poligami

Para ulama' fikih terutama ulama empat mazhab, menyepakati bahwa seorang suami dibolehkan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami. Perbedaan ini terjadi terhadap ulama *mutaqqidimin* (ulama yang hidup pada abad keempat hijiriyyah) dan ulama' *mutaakhirrin* (ulama yang hidup pada abad kelima hijiriyyah dan seterusnya). Imam an-Nawawi misalnya dalam kitabnya *al Majmu'* menyebutkan bahwa seorang laki-laki merdeka itu diperbolehkan untuk menikahi wanita maksimal empat orang, dengan catatan bahwa lelaki tersebut mampu berbuat adil terhadap semua isterinya.[17] Imam Nawawi berpedoman kepada ketentuan al Quran surat an Nisa' ayat 3 dan hadis nabi tentang sahabat Ghailan bin Salmah al Saqafy yang mempunyai sepuluh orang isteri kemudian menceraikannya sehingga sisa isterinya menjadi empat orang.

Imam Sawi dalam kitabnya *Hasyiyah al-Sawi* dan Imam Syarwani dalam kitabnya *Hawasyi al Syarwani* dan ulama lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin berpoligami adalah kesanggupan diri

---

[17]Imam Nawawi, *al Majmu'*, juz 16, (Beirut, Darul Fikr, 1991), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya.[18] Begitu juga ulama seperti Wahbah Zuhaily salah seorang ulama kontemporer yang menyebutkan di dalam kitabnya *al Fiqh Islami wa Adillatuhu* dengan mengatakan bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin berpoligami yaitu[19] :

a. Kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mahu melakukan poligami. Artinya, seandainya syarat ini tidak dipenuhi maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat.

b. Kesanggupan untuk memberikan nafkah terhadap isteri-isterinya. Islam tidak membenarkan terhadap siapapun untuk berkawin, kalau soal kemampuan untuk memberikan nafkah tidak siap dilakukan. Hal ini berlaku bagi orang yang baru pertama kali mahu menikah dan juga berlaku bagi orang yang mahu berpoligami.

Demikian pendapat para ulama dari aliran mazhab yang berbeda(mazhab empat) mengenai persyaratan poligami yang kelihatannya mengandung persamaan antara satu dengan yang lain dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari sekian banyak pandangan yang disebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa poligami itu dibolehkan bahkan dibenarkan kalau memenuhi beberapa syarat berikut:

---

[18]Imam syarwani, *Hawasyi al Syarwani*, juz 9, (Beirut, Darut Fikr, 1991), 136

[19]Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, juz 9, 6669

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wanita yang dinikahi haruslah beragama Islam
2. Laki-laki khawatir terjerumus pada perzinahan kalau tidak berpoligami.
3. Mampu berbuat adil dalam hal bergilir, soal nafkah, tempat tinggal dan sebagainya.
4. Meminta persetujuan dari isteri sebelumnya.

F. Hikmah Poligami

a. Sebagai bentuk pembelaan dan mengangkat martabat wanita dari terdzalimi, dan tertindas.

b. Sebagai bentuk pendidikan kepada umat Muhammad SAW bahwa poligami bukanlah ajang atau ruang untuk memuaskan hawa nafsu semata.

c. Mengurangi dampak prositusi, menyelamatkan anak dan wanita dari kehidupan yang tidak terurus sekaligus bentuk memenuhi seruan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 PASAL 21 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Persyaratan poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001

1. Latar Belakang Ordinan

Sebelum kemerdekaan negara bagian Sarawak, memang sudah dibentuk institusi peradilan yang dinamakan sebagai Mahkamah Melayu Sarawak yang mengurus semua perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan Islam berdasarkan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak tahun 1915 dan diubah kembali pada tahun 1956 karena dinilai mengandung beberapa kelemahan. Akhirnya pada tahun 1978, Mahkamah Syariah telah didirikan dibawah Undang-undang Majlis Islam Sarawak.[1] Pada tanggal 1Maret 1985, Mahkamah Syariah telah mempunyai sistem Undang-undangnya tersendiri yang disebut sebagai Undang-undang Mahkamah Syari'ah Order 1985.

---

[1]Kutipan dari artikal yang diberikan oleh Wakil Pegawai Pendaftar Mahkamah Tinggi Syari'ah Sarawak, Mohamad Nasir bin Morsidi pada 3 Pebruari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam meningkatkan peran dan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah bersetuju untuk menyusun semula organisasi dan fungsi Mahkamah Syariah dengan membentuk tiga peringkat Mahkamah yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Untuk mewujudkan pelayanan hukum yang mandiri dan merdeka, akhirnya mahkamah Syariah telah dipisahkan daripada Majlis Islam Sarawak yang sejatinya sebuah Majelis yang didirikan dibawah *controlan* pemerintah sendiri. Pada tahun 1991, maka kerajaan negeri Sarawak melalui pembahasan undang-undang di Dewan Undangan Negeri (DUN) atau dikenal di Indonesia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meluluskan enam rancangan Undang-undang pada tanggal 1 September 1992 menjadi Ordinan. Hasil daripada pembahasan tersebut, maka terbentuklah Ordinan dengan resminya. Ordinan-Ordinan tersebut adalah :

a) Ordinan Mahkamah Syariah, 1991
b) Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah, 1991
c) Ordinan Acara Mal Syariah, 1991
d) Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah, 1991
e) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 1991
f) Ordinan Keterangan Syariah, 1991

Selain itu, Kaedah-Kaedah Pengacara Syara'e tahun 1992 juga telah diwujudkan untuk memberi garis panduan kepada pengacara dalam mengendalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara. Dewan Undangan Negeri Sarawak (DUN) pada tanggal 6 Nopember 2001, telah merevisi keseluruhan Ordinan tahun 1991 di atas. Ordinan hasil revisi tersebut secara resminya diberlakukan pada 1 Desember 2004 yang memuatkan yaitu :

a) Ordinan Mahkamah Syariah, 2001
b) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001
c) Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001
d) Ordinan Tatacara Jenayah Syariah, 2001
e) Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah, 2001
f) Ordinan Keterangan Syariah, 2001

Perkara yang perlu dipahami juga adalah, istilah yang digunakan untuk sebutan undang-undang di Sarawak adalah Ordinan. Hal ini berbeda dengan di negeri yang lain seperti di negeri Johor, Kelantan, Selangor, Perak, Terengganu dan beberapa negeri lainnya yang menggunakan istilah *Enakmen*[2]. Akan tetapi, makna dari kedua kata yang berbeda ini adalah sama yang membawa pengertian undang-undang. Sekilas tentang peraturan yang mengatur tentang poligami sebanyak 14 negeri di Malaysia, memang terdapat perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Hal ini bisa dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu :

---

[2]Semua negeri di Malaysia menggunakan istilah pasal undang-undang dengan sebutan Enakmen. Misalnya negeri Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Melaka, Johor, Selangor. Kecuali dua buah negeri saja yang menggunakan istilah Ordinan yaitu Sabah dan Sarawak. Siti Fatimah Abdul Rahman *Jurnal IKIM:"Poligami Di Malaysia, Peruntukan Dan Pelaksanaan"*,vol 6. No I. Januari/Juni (Kuala Lumpur, 1998), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bagian I merujuk kepada peruntukan undang-undang yang amat terperinci mulai dari perlunya kebenaran, pengakuan calon, bagaimana permohonan diproses, cara sebuah putusan dicapai, peluang untuk banding atau *penalti*(sanksi hukuman dan denda). Terdapat 11 negeri bisa dimasukkan ke dalam bagian ini. Negeri-negeri itu adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah termasuk juga Sarawak.[3]

b. Bagian II merujuk kepada negeri-negeri yang peruntukan undang-undang tidak begitu terperinci. Undang-undangnya hanya menyentuh tentang perlunya kebenaran dan *penalty* (sanksi hukuman dan denda) yang boleh dijatuhkan sekiranya kebenaran poligami tidak ada. Enakmen(istilah pasal undang-undang) bagi negeri ini tidak menyebut tentang pengakuan, cara ia diproses, bagaimana keputusan dicapai ataupun tentang peluang untuk mengajukan banding. Hanya dua negeri saja yang termasuk dalam bagian ini yaitu Kelantan dan Terengganu Darul Iman.

c. Bagian III yang lain dari yang lainnya. Satu-satunya negeri yang mempunyai aturan undang-undang seperti ini ialah negeri Perak. Undang-undang yang mengatur tentang Poligami hanya menyebut tentang perlunya si lelaki mendapat pengesahan dari *Qadi* dan juga tentang denda jika ia gagal berbuat demikian.

---

[3] *Ibid.* 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Poligami Menurut Ordinan

Pertama, peruntukan undang-undang terhadap poligami di Malaysia mengikut masing-masing negeri bagian adalah berbeda. Namun dari sudut pelaksanaannya adalah sama di semua negeri bagian tersebut[4]. Hal ini bukan bertujuan untuk menyulit atau menafikan pengharusan untuk berpoligami. Namun ia adalah suatu aturan yang sengaja ditentukan bagi memastikan pelaksanaan poligami itu teratur dalam masyarakat, menepati syarat dan mencapai hasrat poligami yang sebenarnya dan sekaligus adalah demi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penganiayaan khususnya terhadap golongan isteri.[5] Hal ini bertepatan dengan hikmah keseluruhan pembentukan institusi keluarga Islam itu sendiri yaitu mencari *al-mawaddah*(kasih sayang) dan *al-rahmah* (belas kasihan) sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada

---

[4]Fatimah Abdul Rahman, *"Poligami di Malaysia:Peruntukan dan Perlaksanaan"*, 139

[5]Abd Basir Mohamad dan Mohd Zain Yahya,*"Isu Syariah Dan Undang-Undang Siri 9"* Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, Universitas Kebangsaan Malaysia, (Kuala Lumpur, Cet.I, 2001), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang demikian itu, benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir" (Surat ar-Ruum: 21).

Hal ini memberi pengertian bahwa, di setiap negeri bagian prosedur poligami harus mengisi formulir permohonan poligami terlebih dulu dan isteri akan diberitahukan hasrat suami dan dipanggil untuk memberi keterangan dan mengikut cara yang telah ditetapkan.[6] Bagi negeri Sarawak ketentuan untuk bepoligami, kebenaran bertulis dari Mahkamah Syariah/ Hakim Syara'e/*Qadhi* adalah sangat diperlukan. Untuk memohon kebenaran ini, calon lelaki harus membuat pengakuan tentang :

1. Mengapa perkawinan yang dicadangkan/disarankan itu perlu;(menyatakan alasan-alasan).
2. Sumber pendapatannya yang terkini.
3. Butir butir komitmen, kewajiban dan tanggungan keuangannya.
4. Termasuk dengan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan poligaminya tersebut.
5. Sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri yang telah ada telah diperoleh ataupun tidak.

Berkaitan dengan proses, semua negeri ada menyebutkan bahwa setelah menerima formulir permohonan, Mahkamah akan memanggil pemohon dan isteri

---

[6] *Ibid.* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supaya hadir di persidangan. Secara umumnya, putusan atau izin yang diberikan oleh hakim untuk berpoligami adalah berdasarkan kepada informasi dari data yang diisi dalam formulir, keterangan yang diberikan oleh pemohon serta keterangan yang diberikan oleh isteri yang sedia ada. Untuk lebih lengkap, pasal UU Sarawak Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 pasal 21 yang menjelaskan perkara ini adalah :

Pasal 21:

Ayat 1 : Tiada lelaki semasa kewujudan sesuatu perkawinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah, membuat akadnikah perkawinan yang lain dengan perempuan yang lain"

Ayat 2 : Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen boleh didaftarkan di bawah Ordinan ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Undang-Undang Islam dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 127"

Ayat 3 : Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri akan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri dan perkahwinan di luar Negeri akan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 4 : Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *'iqrar*[7] menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa ini, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu.

Ayat 5 : Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika

---

[7]Merupakan pengakuan seseorang terhadap sesuatu perkara. *Iqrar* juga merupakan salah satu bentuk keterangan yang diberikan di Mahkamah. Lihat Dr.Zaleha Kamaruddin *"Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam,* (Kuala Lumpur, Zebra Edition Sdn.Bhd,Cet. I 2002), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpuas hati:

(a) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

(b) Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;

(c) Bahawa pemohon akan berupaya memberikan layanan sama rata kepada semua isterinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam; dan

(d) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan *darar syara'e* kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

Ayat 6 : Satu salinan permohonan di bawah subseksyen (4) dan *'iqrar* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki oleh subseksyen itu hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas tiap-tiap isteri yang sedia ada dan bakal isteri.

Ayat 7 : Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001 *[Bab 44];*

Ayat 8 : Mana-mana orang yang membuat akad nikah perkahwinan bersalahan dengan subseksyen (1) dan (2) hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, boleh dituntut sebagai hutang.

Ayat 9 : Tatacara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan di bawah seksyen ini adalah serupa dalam serba perkara dengan yang dipakai bagi perkahwinan-perkahwinan lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan di dalam Negeri dibawah Ordinan ini.

Ayat 10 : Tiap-tiap Mahkamah yang memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah seksyen ini boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan oleh mana-mana pihak kepada perkahwinan, menghendaki orang lelaki supaya membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah kepada isteri atau isteri-isteri dan orang tanggungannya yang sedia ada.

Pasal 127 : Seseorang lelaki yang, semasa perkawinannya yang sedia ada masih berterusan, berkawin lagi di mana-mana jua tempat tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya denda dan penjara itu

Pasal 128 : Seseorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan *talaq* dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Keterangan untuk setiap pasal di atas ke dalam bahasa Indonesia adalah seperti berikut :

Ayat 1 :Tidak ada satu orangpun laki-laki yang masih dalam ikatan perkawinan sebelumnya boleh melakukan perkawinan berikutnya yaitu melakukan akad nikah dengan perempuan lain, kecuali setelah mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahuludaripada Mahkamah."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 2 :Suatu perkawinan yang telah diakadnikah tanpa mendapat kebenaran daripada mahmakah sebelumnya tidak boleh didaftarkan sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan Ordinan, melainkan setelah Mahkamah berpuas hati bahwa perkawinan tersebut sebelumnya memang sah mengikut Undang-Undang Islam dan akan memerintahkan agar perkawinan tersebut diitsbatkan kembali setelah mendapat(membayar) sanksi denda atau penjara sebelumnya.

Ayat 3 :Ketentuan poligami menurut ayat 1 di atas adalah merangkumi perkawinan poligami yang diadakan di dalam negeri ataupun dilaksanakan di luar negeri.

Ayat 4 :Permohonan untuk kebenaran hendaklah diajukan kepada Mahkamah mengikut prosedur yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu *'iqrar* yang menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang diinginkan itu dikatakan harus atau perlu, pendapatan keuangan pemohon yang terbaru, pernyataan komitmennya dan kewajiban dan tanggungan keuangannya yang harus ditentukan, jumlah orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang diinginkan itu, termasuk izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disarankan itu.

Ayat 5 :Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang menurut pandangan Mahkamah boleh memberi informasi berhubungan tentang perkawinan yang disarankan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu jika berpuas hati:

a. Bahwa perkahwinan yang disarankan itu adalah harus atau perIu, memandang kepada, antara lain, kondisi yang berikut, yaitu, kemandulan, keuzuran fisik, tidak layak dari sisi fisik untuk persetubuhan, tidak mahu mematuhi kehendak suami untuk berobat bagi memulihkan kondisi, atau terkena penyakit gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

b. Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang diinginkan itu;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa pemohon akan berupaya memberikan layanan sama rata(adil) kepada semua isterinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam; dan

d. Bahwa perkahwinan yang diingini itu tidak akan menyebabkan *darar syara'e*[8] (mudhorat) kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

Ayat 6 :Satu salinan copian permohonan seperti yang disebutkan di dalam pasal empat sebelumnya dan *'iqrar* yang dikehendaki oleh pasal tersebut hendaklah disampaikan bersama dengan surat panggilan ke atas setiap isteri yang sedia ada dan bakal isteri.

Ayat 7 :Sekiranya terdapat pihak yang tidak berpuas hati atau merasa dirugikan dengan apa juga bentuk putusan Mahkamah boleh mengajukan banding terhadap keputusan itu mengikut cara yang telah ditentukan dalam Ordinan Tatacara Mal Syariah, 2001 *[Bab 44];*

---

[8]Sebarang bentuk marabahaya dan kemudharatan yang berlaku terhadap seseorang sama ada yang berkaitan dengan tubuh badannya, akal pikirannya, nyawa, harta atau agamanya seperti yang telah diakui oleh hukum syara'. Lihat *Kamus Istilah Undang-Undang*, Zaleha Kamaruddin, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 8 :Barangsiapa yang membuat akadnikah perkawinan yang menyalahi ketentuan ayat 1 dan 2 hendaklah membayar dengan serta-merta semua jumlah mas kahwin dan pemberian yang harus dibayar kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada, dan jumlah itu, jika tidak dibayar sedemikian, bisa dianggap sebagai hutang."

Ayat 9 :Tatacara bagi akadnikah dan pendaftaran sesuatu perkahwinan menurut pasal ini adalah sama dalam kebanyakan perkara yang bersangkutan dengan perkawinan yang lain yang diakadnikahkan dan didaftarkan menurut Ordinan ini

Ayat 10 :Tiap-tiap Mahkamah yang bersangkutan memberi kebenaran atau memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan di bawah pasal ini boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan oleh mana-mana pihak kepada perkahwinan, mengkehendaki orang lelaki supaya membayar nafkah kepada isteri atau isteri-isteri dan orang tanggungannya yang sedia ada.

Pasal 127 :Seseorang lelaki yang, semasa perkawinannya yang sedia ada masih berterusan, berkawin lagi di tempat yang berbeda tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duanya denda dan penjara itu

Pasal 128 :Barangsiapa yang menceraikan isterinya dengan melafazkan *talaq* dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Setelah memahami isi kandungan pasal demi pasal Ordinan yang mengatur poligami di atas, bisa diambil kesimpulan awal bahwa sekiranya para hakim benar-benar berpuas hati bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan di atas, maka dengan wewenang yang telah diberikan undang-undang terhadap mereka, maka hakim boleh meluluskan atau tidak suatu permohonan tersebut. Wewenang penuh diberikan oleh Ordinan untuk memberikan izin untuk berpoligami atau tidak kepada pemohon. Melihat kepada kriteria di atas, mungkin yang terlewati di pikiran akan suatu persoalan. Apakah pemohon perlu memenuhi semua kriteria di atas ataupun hanya cukup dengan memenuhi salah satu atau dua daripada kriteria tersebut?

Menurut Yang Berbahagia Dato' Dr. Abdul Monir Yaakob, Wakil Kepala Institut Kemahiran Islam Malaysia(IKIM)[9] yang merupakan seorang pakar tentang Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, untuk melayakkan seorang pemohon

---

[9]Siti Fatimah Abdul Rahman, *"Poligami Di Malaysia:Peruntukan dan Perlaksanaan"*, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu untuk berpoligami, dia hendaklah memenuhi kesemua ketentuan tersebut. Oleh demikian, para hakim dalam memutuskan suatu kasus untuk memberikan kebenaran poligami, hendaklah memastikan bahwa semua persyaratan tersebut dipenuhi oleh pemohon yang bersangkutan.

3. **Persyaratan Poligami**

Undang-undang Sarawak Bab 43 Ordinan UU Keluarga Islam tahun 2001 memperincikan mengenai persyaratan poligami di dalam Ordinan pasal 21. Pertama, ketentuan persyaratan poligami mengkehendaki pemohon poligami harus mengisi formulir permohonan poligami terlebih dahulu dan isteri akan diberitahukan hasrat suami serta dipanggil untuk memberi keterangan sekaligus mengikut cara yang telah ditetapkan. Bagi negeri Sarawak ketentuan untuk bepoligami, kebenaran bertulis dari Mahkamah Syariah/ Hakim Syara'e/*Qadhi* adalah sangat diperlukan. Ketantuan Ordinan menyatakan :

Pasal 21:

Ayat 1 : *Tiada lelaki semasa kewujudan sesuatu perkawinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah, membuat akadnikah perkawinan yang lain dengan perempuan yang lain"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memohon kebenaran ini, calon lelaki harus membuat pengakuan tentang :

1. Mengapa perkawinan yang dicadangkan/disarankan itu perlu;(menyatakan alasan-alasan).
2. Sumber pendapatannya yang terkini
3. Butir butir komitmen, kewajiban dan tanggungan keuangannya.
4. Termasuk dengan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan poligaminya tersebut.
5. Sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri yang telah ada telah diperoleh ataupun tidak.

Hal yang disebutkan diatas dijelaskan di dalam pasa 21 ayat 4 berikut :

Ayat 4 :"Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu 'iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa ini, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu".

Kedua, persyaratan poligami selanjutnya yang dikehendaki oleh UU Sarawak di dalam Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam adalah pemohon poligami hendaklah mempunyai kemampuan yang membolehkan dirinya menanggung beban nafkah, tempat tinggal, makan dan minum serta lain-lain kebutuhan sebagaimana yang diinginkan di dalam prinsip hidup berumahtangga. Sudah pasti, kemampuan itu bisa diukur dari sumber pendapatan suami sebelumnya atau sudut ekonomi suami yang sudah mapan. Kebutuhan tersebut wajib dipenuhi ke atas semua isterinya dan anak-anak yang menjadi tangunggannya dan yang akan menjadi ahli keluarga barunya. Hal ini dijelaskan di dalam ayat 5 huruf (b) :

" Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu; "

Ketiga, tidak cukup dengan kemampuan suami menutup kebutuhan semua isteri dan anak-anak nantinya, maka Ordinan menggarisbawahi ketentuan persyaratan berikutnya tentang pemohon poligami haruslah bisa dan berupaya memberikan layanan sama rata(adil) kepada semua isterinya sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Quran dan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dinyatakan di dalam pasal 5 huruf (c) :

"Bahawa pemohon akan berupaya memberikan layanan sama rata kepada semua isterinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Islam;"

Keempat, harus ada kepastian dari pihak suami bahwa persyaratan mengenai perkawinan yang diinginkannya tidak akan menyebabkan *darar syarie* (kemudhoratan) kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Pasal 5 huruf (d) menyebutkan :

"Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada."

Jadi, jelas bahwa persyaratan poligami menurut ketentuan UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2001 memaparkan empat persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon poligami. Namun demikian terdapat persyaratan lainnya yang mungkin tidak disebutkan di dalam Ordinan akan tetapi menurut pertimbangan pihak Mahkamah maka harus dipenuhi dan disertakan sewaktu pengajuan permohonan.

4. Alasan Poligami

Ketentuan alasan berpoligami yang disebutkan di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 menggarisbawahi beberapa alasan yang harus dikemukakan oleh pemohon poligami di Sarawak. Secara lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci Ordinan menyatakan bahwa permohonan poligami harus dikemukakan dengan melampirkan perkara berikut. Pertama, suatu *'iqrar* yang menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang diinginkan itu harus dilaksanakan. Hal ini di sebutkan di dalam pasal 21 ayat 4 :

".....hendaklah disertai dengan suatu 'iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu;"

Kedua, Ordinan menjelaskan lagi tentang alasan yang dimakudkan di dalam suatu *'iqrar* yang diajukan kepada Mahkamah adalah dengan melihat kepada pertimbangan perkara berikut :

i. Kemandulan
ii. Keuzuran fisik jasmani
iii. Tidak layak dari sudut fisik jasmani untuk bersetubuh
iv. Isteri sengaja ingkar untuk tidak mematuhi perintah suami untuk pemulihan hak-hak persetubuhan (melakukan suatu usaha pengobatan)
v. Atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.

Pada keterangan di atas, telah dijelaskan bagaimana persyaratan utama dalam berpoligami yang hanya dibolehkan bagi sesiapapun seorang muslim dalam arti yang sesungguhnya dan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Seseorang hanya dibolehkan beristeri seorang saja apabila persyaratan utama ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. Namun, pada suatu sisi yang lain, seorang pemimpin rumah tangga sebenarnya tidak lepas dari tanggungjawab dan beban terhadap persoalan nafkah, pendidikan anak-anak, hubungan antara sang anak dengan ibu tiri, juga hubungan antara keluarga dengan keluarga pihak para isteri-isterinya serta masih banyak hal lainnya yang harus dititikberatkan. Atas dasar itulah undang-undang memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai alasan bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami.

Melihat kepada alasan berpoligami seperti yang diberikan oleh pemohon, penulis mendapati bahwa terdapat pebagai alasan yang mendorong seeorang untuk berpoligami. Hal ini disingkatkan ke dalam jadual berikut[10] :

Alasan	Perincian
Kemampuan suami	Mampu. Yaitu berkemampuan dari sudut lahiriah dan batiniah serta mampu dari sisi ekonomi dan sehat tubuh badan
Zuriat	Tidak dikarunia *zuriat* setelah sekian lama menikah sekitar(10-15tahun), lalu ingin mempunyai *zuriat* atau menambah *zuriat* yang ada

[10]Siti Fatimah Abdul Rahman *Jurnal IKIM: "Kristeria Poligami dan Alasan Penghakiman"*, vol 7. No II. Juli/Desember (Kuala Lumpur, 1999), 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isteri dan perhubungan dengan isteri	Isteri yang ingkar terhadap perintah suami, kesehatan isteri, keizinan dari isteri, masalah dalam hubungan suami isteri dan lain-lain
Bakal isteri dan hubungan dengan bakal isteri	Sudah lama mengenalinya, suka sama suka,merupakan rekan bisnes, seorang janda, mempunyai rasa tanggungjawab kepada anak-anaknya termasuk dirinya, mengasihi bakal isteri yang sering sakit, ingin membimbing isteri ke jalan yang benar, agar dapat mengurangi beban isteri pertama, ingin membantu kehidupan bakal isteri yang tidak terawat atau pernah melakukan hubungan sebelum nikah
Keluaga	Dipersetujui oleh keluarga

Inilah beberapa alasan yang sering menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin permohonan untuk berpoligami. Dalam membuat keputusan, para hakim juga akan membuat penyelidikkan terhadap pihak isteri berkaitan dengan kebenaran dakwaan pemohon(suami). Secara umumnya, kelulusan akan diberikan dalam kasus terhadap halangan di pihak isteri walaupun terdapat alasan yang lain yang bisa menjadi pertimbangan hakim tetapi tidak dinyatakan di dalam jadwal.

Hal ini seperti yang disebutkan pada pertama kali dalam jadual tentang kemampuan suami dari sudut lahir dan batin, pengajuan suami yang ia amat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyayangi bakal isteri serta keinginan suami untuk membantu janda. Begitu juga dengan kemampuan bakal isteri pula, hakim akan meluluskan sekiranya mendapati bahwa bakal isteri itu mempunyai pendapatan sendiri dan dianggap bisa meringankan bebanan pemohon tersebut.

Alasan lain yang diterima oleh hakim ialah untuk melindungi sodara baru(muallaf) dan persetujuan dari wali bakal isteri. Berdasarkan kepada alasan mengapa suatu poligami itu dikatakan perlu dan patut, terdapat bahwa sebab-sebab yang diterima oleh hakim bukanlah setakat halangan dipihak isteri semata-mata seperti yang disebutkan di dalam Ordinan saja, tetapi juga sebab-sebab lain yang membuat para hakim berpuas hati bahwa perkawinan itu diyakini perlu.

B. Persyaratan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia masalah poligami diatur oleh Undang-Undang No 1/1974 tentang perkawinan. Peraturan permerintah RI No 9/1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1/1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui PP no10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.[11] Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

---

[11]Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia,2000), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman mengatakan bahwa untuk mengetahui latar belakang penyusunan KHI tidak bisa dijawab dengan singkat. Akan tetapi bila kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret tahun 1985 No. 07/KMA/1985 dan No 25 tahun 1985 tentang penunjukkan pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukan dua pertimbangan mengapa proyek ini dilaksanakan yaitu[12] :

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya di pengadilan agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di pengadilan agama.

b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, singkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI.

Dalam sebuah tulisan K.H Hasan Basri yang dikutib oleh Abdul Rahman mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam, K.H Hasan Basri menyebutkan bahwa

---

[12]Abd Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan menjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga–lembaga peradilan agama karena sebab-sebab khilaf yang disebutkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri, karena selama ini ketika belum adanya Kompilasi Hukum Islam, praktik sering terlihat adanya keputusan pengadilan agama saling berbeda antara satu keputusan dengan keputusan yang lain, padahal kasusnya sama, bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham.[13]

Bila diteliti lebih jauh, ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai kaitan yang erat ekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan pendapat para ulama, intelektual, tokoh masyarakat ditambah dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat turut mewarnai nuasa perkembangan hukum Islam sehingga dengan penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan berbagai penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum negara-negara Islam lainnya termasuklah masalah poligami.[14]

---

[13] *Ibid*, 20

[14] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2002), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masrani Basran mengemukakan bahwa, di antara hal yang melatarbelakangi diadakan Kompilasi Hukum Islam adalah ketidakjelasan persepsi tentang syariat Islam dan fikih. Dikemukakannya sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia terjadi kekerungan atau dapat dikatakan kekacauan persepsi tentang arti syari'at, kadang-kadang disamakan antara syari'at dan fikih, padahal syari'at Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, maka persepsi yang keliru atau tidak jelas ini akan mengakibatkan pula kekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang kehidupan umat baik dalam konteks masyarakat atau bernegara.[15]

Sedangkan menurut Suparman, latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Intruksi No 1 tahun 1991, yaitu[16]:

1. Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama yang berpaksi pada ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan pewujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

---

[15]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*,(Jakarta,Sinar Grafika,1993), 28

[16] Cik Hasan Bisri, *KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*,(Ciputat Logos, Wahana Ilmu,1999) 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sedarjat dengan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum materiil yang selama ini berlaku dilingkungan Pengadilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menurut Suparman lagi, merupakan upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang seragam bagi semua hakim di lingkungan Peradilan Agama dan instansi terkait, khususnya dalam bidang perkawinan.

Munawwir Syazali mengatakan bahwa negara Indonesia aneh tapi nyata; karena walaupun Indonesia sudah memiliki Pengadilan Agama yang usianya sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standart yang dapat dijadikan rujukan secara bersama seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini akhirnya berakibat kepada para hakim Pengadilan Agama menghadapi kasus yang harus diadili dengan merujuk berbagai kitab fikih tanpa ukuran standart atau keseragaman. Akibat lanjutnya, secara praktis terhadap kasus yang sama dapat lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim yang berbeda. Inilah yang menurut teori hukum dikatakan sebagai produk hukum peradilan agama yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Akhirnya pada tahun 1985 maka pemerintah telah memprakasai Proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antar Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang diluncurkan di Hotel Ambarukmo,Yogyakata ketika itu diproyeksi bahwa buku hukum(Kompilasi Hukum Islam) tersebut akan menjadi buku standart yang tunggal bagi hakim-hakim di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.[17]

2. Pelaksanaan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan mengenai poligami terdapat di dalam pasal No 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa poligami yang hanya dibenarkan oleh undang-undang adalah beristeri tidak melebihi(terbatas) empat orang. Diikuti pada ayat 2 menjelaskan bahwa syarat utama untuk berpoligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Bicara mengenai sebuah keizinan untuk berpoligami, pasal 56 dan pasal 57 memperuntukkan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin jika mengadung sebab yang berikut antaranya :

a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

---

[17]Munawwir Syazali, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta,UII Press,1993), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c) Atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 ayat 1 pula, menjelaskan bahwa akan bentuk persetujuan dari pihak isteri dan kepastian bahwa pihak suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri tidak diperlukan sekiranya pihak isteri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian yaitu jika isteri menjadi gila, atau tidak ada kabar dari isteri sekurang-kurannya 2 tahun. Namun apabila pihak isteri enggan atau tidak mahu memberi persetujuan, maka pasal 59 mengadakan ketentuan bagi perkara itu diselesaikan oleh Pengadilan Agama selepas mendengar isteri tersebut.

Hal ini telah disusun rapi di dalam pasal undang-undang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara lengkap seperti dibawah :

Pasal 55

ayat 1 : Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

Ayat 2 : Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan ank-anaknya.

Ayat 3 : Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 56

Ayat 1 : Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

Ayat 2 : Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Ayat 3 : Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Ayat 1 : Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 58

Ayat 1 : Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55(2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu :

a. Adanya persetujuan isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

Ayat 2 : Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Ayat 3 : Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari iteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 : Dalam hal isteri tidak mahu memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang atas salah satu alasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

3. **Persyaratan Poligami**

Salah satu isi Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan adalah ketentuan poligami(beristeri lebih dari seorang) yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1, 2 dan 3), pasal 56 ayat (1, 2 dan 3), pasal 57 huruf(a, b dan c) serta pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat(2) serta ayat (3) pada pasal yang sama dan pasal 59. Namun untuk pasal 58 ayat(1) huruf (a) mengenai persetujuan isteri bagi suami yang mahu beristeri lagi jelas merupakan hasil ijtihad dari para perumus Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang membidangi hukum perkawinan. Dengan demikian, perlu untuk mencari latar belakang dari ketetapan pasal 58 ayat (1) huruf (a) dari para perumus KHI itu sendiri. Akan tetapi penulis merasa kesulitan dalam mencari data dari perumus secara langsung. Oleh karena itu, penulis mencari data dari beberapa buku yang ditulis oleh beberapa ahli hukum. Hasilnya penulis hanya menemukan satu keterangan dari buku yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" yang ditulis oleh Yahya Harahap. Di dalam buku ini diijelaskan bahwa pasal-pasal KHI yang terkait dengan poligami itu tidak semuanya diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kitab-kitab fikih. Pasal 58 misalnya, itu adalah murni ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan "ketertiban umum".[18]

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa poligami khusus bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang. Mengenai persyaratan untuk berpoligami, ketentuan tersebut di atur di dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 40 No. 9 Tahun 1975, penjelasannya sebagai berikut :

a) Harus ada izin dari Pengadilan

b) Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan

Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin ini pula harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan hal ini diatur di dalam pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sebagai berikut :

---

[18]Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat seperti berikut, yaitu :

   a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri yang terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan itu tertulis, hakim biasanya mendengar langsung dari pihak isteri di depan sidang.

   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

      Di dalam menentukan ukuran mengenai sebuah jaminan, hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan. Penilaian ini dapat dibuat oleh Hakim saat permohonan diajukan. Jumlah kekayaan ini didasarkan kepada surat keterangan penghasilan suami yang telah ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami berkerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.

   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Untuk mengetahui dan menentukan sebuah jaminan yang diberikan atau tidak suami, Hakim akan meminta surat pengakuan atau surat penyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Apabila suami menyalahi atau melanggar ikrar jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan kepada pihak pengadilan.[19]

Menurut penulis, persyaratan yang mengharuskan adanya izin isteri dalam poligami merupakan upaya dari pengadilan untuk mempetemukan keinginan suami sesuai dengan keinginan sang isteri dengan harapan kedepannya tidak ada rasa ketidaknyamanan atau merasa dirugikan apalagi merasa terdzalimi. Hal ini sekaligus untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Seterusnya persyaratan Poligami berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam akan diperjelaskan satu persatu menurut susunan seperti berikut :

Pasal 55

Ayat 1 : *Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri*

Hal ini bisa dipahami bahwa, Kompilasi Hukum Islam telah membatasi ketentuan untuk berpoligami hanya dibenarkan mengahwini paling banyak empat

---

[19]Undang-Undang Perkawinan, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang isteri. Hal ini disandarkan kepada penegasan bilangan yang disebutkan oleh al-Quran yang menyebut bilangan isteri hanya sampai kepada empat orang isteri saja. Firman Allah s.w.t :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu menikahi dengan mereka), maka nikahilah perempuan(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."*.[20]

Hal yang sama, disebutkan oleh ayat tersebut di atas dengan kalau benar-benar seorang suami bisa menginterpretasikan keadilan yang seutuhnya terhadap semua isteri yang telah dikawini.

Ayat 2 :Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

---

[20] *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet.V,2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Alasan Poligami

Mengutip alasan di dalam Pasal 4 ayat 22 UU Perkawinan dirinci alasan untuk bolehnya melakukan poligami. Kebolehan melakukan poligami adalah manakala, (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan –alasan yang dikemukakan oleh isteri tersebut juga harus dibuktikan di depan sidang Pengadilan. Hal ini turut juga disebutkan di dalam PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut :

Pasal 41 :

"Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   - *Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
   - *Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
   - *Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Jelas bahwa, Undang-Undang yang mengatur tentang poligami baik Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 hanya menggaris bawahi tiga alasan utama untuk seorang suami bisa mengajukan permohonan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG SARAWAK BAB 43 ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2001 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG POLIGAMI

A. Persamaan antara Ketentuan Persyaratan Poligami Menurut UU Sarawak Ordinan UU Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pelaksanaan Poligami

Tinjauan dari sisi persamaan, UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam mengandung beberapa ketentuan yang sama. Perkara pertama yang harus diperhatikan oleh pemohon di dalam pelaksanaan permohonan poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam adalah seperti berikut:

a. Mengisi formulir pemohonan poligami terlebih dahulu. Di dalam fomulir permohonan mengharuskan pemohon untuk menyertakan segala informasi dan data yang dikehendaki berkaitan dengan data peribadi seperti di bawah:

   1) Nama dan nomer kartu penduduk (KTP)

   2) Latar pendidikan pemohon, bilangan pasangan isteri yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Agama dan bangsa

4) Nama calon isteri kedua, pekerjaan calon isteri, status perkawinan isteri kedua

5) Tanggal dan tempat perkawinan yang akan dilangungkan

6) Bentuk maskawin(tunai atau hutang)

7) Pengesahan oleh majikan tempat pemohon bekerja atau oleh Kepala Desa tempat pemohon tinggal

8) Ikrar pemohon bahwa segala informasi dan data yang diberikan adalah benar

9) Disertai syarat tambahan seperti KTP wali, sertifikat nikah ibubapa pihak perempuan, sertifikat kursus Pra-perkawinan atau pernyataan lulus wawancara, surat perakuan cerai bagi pasangan yang janda, kebenaran daripada pihak wewenang tentara atau polisi(sekiranya anggota), surat kebenaran nikah daripada pihak Mahkamah, dan surat kebenaran untuk berpoligami

b. Mendapat surat kebenaran bertulis daripada Mahkamah

Di dalam pasal 21 ayat (1) UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam turut sama mengkehendaki pemohon poligami harus mengantongi surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran secara bertulis daripada Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama.

Hal ini dijelaskan di dalam pasal seperti berikut :

Pasal 21 ayat (1) :

"Tiada lelaki semasa kewujudan sesuatu perkawinan boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah, membuat akadnikah perkawinan yang lain dengan perempuan yang lain"

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 57 ayat (1):

"Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama"

c. Apabila menerima permohonan poligami, Mahkamah akan memanggil pemohon untuk hadir di Mahkamah, isteri yang pertama ataupun isteri-isterinya yang lain. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan daripada pihak isteri apakah bersetuju atau tidak. Turut bisa dihadirkan oleh Mahkamah adalah bakal isteri, wali kepada bakal isteri. Artinya, siapa dirasakan perlu yang menurut pandangan Mahkamah boleh memberikan keterangan apabila permohonan poligami itu didengar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan. Pada kebiasaannya, permohonan poligami di dengar di dalam persidangan tertutup.

Ketentuan ini disebutkan dengan terperinci di dalam kelanjutan pasal 21 ayat (5) yaitu :

"Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup."

Begitu juga di dalam Bab VIII Pasal 42 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang turut membawa pengertian yang sama dengan penjelasan singkat seperti berikut :

"Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41,Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan".

d. Dalam perkara permohonan poligami, setelah dijatuhkan putusan dan para pihak bersangkutan merasa dirugikan dengan putusan tersebut, atau tidak berpuas hati terhadap bentuk putusan Mahkamah, disini Mahkamah memberi ruang untuk salah satu pihak atau kedua-dua pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi mengajukan bantahan dengan cara pihak bersangkutan mengajukan kepada Mahkamah supaya berkas perkara tersebut didengar dan disidangkan kembali di Mahkamah. Hal ini turut sama diatur di dalam KHI yang memberi ruang kepada pihak berperkara yaitu suami atau isteri untuk bisa mengajukan banding dan kasasi. Pasal UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam yang menjelaskan perkara berikut adalah :

Pasal 21 ayat (7) :

"Mana-mana pihak yang terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan Mahkamah boleh merayu terhadap keputusan itu mengikut cara yang diperuntukkan dalam Ordinan..."

Manakala Pasal di dalam KHI yang menjelaskan perkara yang serupa adalah :

Pasal 59 :

"Dalam hal isteri tidak mahu memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat(2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi"

2. **Persyaratan Poligami**

Untuk dapat mengajukan permohonan bolehnya poligami, maka sang suami harus melengkapi beberapa persyaratan. Ketika membahas persyaratan poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam ternyata mengandung persamaan dan perbedaannya. Disini akan dijelaskan terlebih dulu sisi persamaannya menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam yang akan dirincikan seperti berikut:

a. Permohonan kebenaran poligami kepada Mahkamah Syari'ah atau kepada Pengadilan Agama hendaklah disertai dengan alasan dan sebab mengapa perkawinan yang dipohon tersebut adalah perlu. Hanya saja Ordinan Undang-undang Keluarga Islam tahun 2001 menggariskan dengan lebih terperinci apa saja persyaratan poligami yang harus dilengkapi seperti berikut :

   1) Disertai dengan suatu *'iqrar* yaitu mengapa perkawinan poligami itu diperlukan.

   2) Jumlah pendapatan atau gaji pemohon yang terkini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surat yang menyatakan komitmen dan kewajiban pemohon dan jumlah tanggungan keuangan yang harus ditentukan terlebih dahulu
4) Bilangan orang tanggungannya, termasuk juga orang yang akan menjadi tangunggannya
5) Izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang telah ada

Hal di atas disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) UU Sarawak bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam seperti berikut:

"Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu 'iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan pemohon pada masa ini, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinannya yang dicadangkan itu".

Di dalam pasal Kompilasi Hukum Islam, perkara mengenai syarat-syarat ini dinyatakan di dalam pasal 58 ayat (2) yang dijelaskan di dalam pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

41 ayat (c) dan (d) PP Nomer 9 tahun 1975 yaitu :

"Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan":

- *Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau*
- *Surat keterangan pajak penghasilan; atau*
- *Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan*

Ayat (d) yaitu :

"Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat di dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu".

b. Selanjutnya di dalam pasal 58 ayat 1 menetapkan, untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, ternyata harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 yaitu :

"Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 yaitu :

a. Adanya persetujuan isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Alasan poligami**

UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi hanya beberapa alasan yang akan menjadi bahan pertimbangan Hakim di Mahkamah atau di Pengadilan. Alasan yang dimaksudkan disini adalah kenapa dan mengapa poligami tersebut ingin diajukan ke Mahkamah atau pengadilan. Alasan ini nantinya akan menjadi alat pendukung yang kuat untuk Mahkamah Syari'ah memberikan izin poligami kepada pemohon(suami). Misalnya sang isteri pertama tersebut mengalami hal-hal yang berikut:

- Mengalami kemandulan
- Fisik anggota badan yang sudah uzur
- Mengalami suatu penyakit kelamin
- Sengaja ingkar untuk tidak mematuhi perintah suami untuk mengobati penyakitnya
- Terkena penyakit gila terhadap isteri pertama atau isteri-isterinya yang lain

Disini bisa di analisis seperti yang dimuatkan di dalam kelanjutan dari pasal 5 ayat (a) Ordinan Undang-undang Keluarga Islam yaitu :

Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut iaitu kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

Hal ini juga sama dengan ketentuan di dalam KHI pasal 57 ayat (a),(b),(c) dibawah yaitu :

"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila" :

a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;*
b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*

Hanya saja di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam turut memuat tentang penyakit gila di pihak isteri dan juga isteri yang tidak mahu menjalankan perintah suami untuk mengobati penyakitnya tersebut. Hal yang demikian ini berbeda seperti yang dimuatkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan antara Ketentuan Persyaratan menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pelaksanaan Poligami

Suatu perbedaan yang ingin dikaji adalah apa saja yang dari sudut isi, maksud dan pengertian yang digunakan di dalam pasal menunjukkan pengertian berbeda. Misalnya salah satu istilah yang digunakan di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam mungkin tidak ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, ataupun sebaliknya atau bisa saja istilah yang digunakan adalah berbeda dari sudut pengertian.

Di dalam pelaksanaan poligami, ketentuan di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam mengandung beberapa perbedaan dari sudut isi pasal, istilah yang digunakan, ataupun makna yang ingin disampaikan. Hal ini bisa dilakukan analisa seperti berikut :

I. Di dalam Ordinan Undang-undang Keluarga Islam tidak mengatur ketentuan dan batas bilangan isteri yang boleh dikawini oleh pemohon poligami.

   Akan tetapi, ketentuan yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan garis batasan yang tegas tentang bilangan isteri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dikawini. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tegas menjelaskan :

"Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan tebatas hanya sampai empat isteri".

Disini penulis pahami bahwa, Kompilasi Hukum Islam telah berupaya menggaris bawahi batasan bilangan isteri yang boleh dikawini dengan tegas. Hanya saja, dari pengertian penggunaan istilah "pada waktu bersamaan" di dalam pasal tersebut bisa dipahami dengan dua pengertian yaitu :

a. Boleh berpoligami melebihi empat isteri asalkan dengan cara tidak diadakan pada waktu bersamaan; atau

b. Batas empat isteri tersebut adalah ketentuan mutlak.

Dampaknya penggunaan istilah yang tidak jelas ini akhirnya mengundang pelbagai persepsi dan tanggapan yang berbeda.

II. Ketentuan Ordinan Undang-undang Keluarga Islam pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa ketika suatu perkawinan poligami yang dilakukan tanpa kebenaran Mahkamah Syari'ah terlebih dahulu, maka perkawinan itu menurut Undang-Undang yang berlaku adalah tidak sah dan tidak bisa untuk didaftarkan di bawah Ordinan Undang-undang Keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam(tidak mempunyai kekuatan hukum) kecuali jika mahkamah benar-benar berpuas hati bahwa perkawinan tersebut sebelumnya adalah sah mengikut Undang-undang Islam yang berlaku. Artinya adalah masih ada kesempatan untuk di *istbat*-kan perkawinan tersebut dengan ketentuan bahwa pemohon telah membayar denda sebelumnya. Hal ini disebutkan di dalam pasal 21 ayat(2) seperti berikut :

"Tiada perkahwinan yang diakadnikahkan tanpa kebenaran di bawah subseksyen (1) boleh didaftarkan di bawah Ordinan ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Undang-Undang Islam dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 127".

Berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan poligami yang tidak mendapat izin pengadilan, hanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti yang disebutkan pasal 56 ayat (3) :

"Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum"

III. Ordinan Undang-undang Keluarga Islam juga mengatur ketentuan terhadap perkawinan poligami yang dilakukan oleh pemohon yang berwarganegara yang tinggalnya di dalam negeri Sarawak atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan poligami tersebut di lakukan di luar negara Malaysia. Artinya, sekiranya pemohon berada tinggal di luar negara Malaysia, maka, pemohon tersebut harus mendapatkan izin dan kebenaran dari Mahkamah Syari'ah untuk boleh berpoligami terlebih dahulu. Pasal 21 ayat(3) menyebutkan :

"Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Negeri akan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau di luar Negeri dan perkahwinan di luar Negeri akan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Negeri"

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur ketentuan bagi pelaku poligami yang tempat tinggalnya berada di luar negeri atau perkawinan poligaminya dilakukan diluar negeri.

IV. Permohonan Poligami yang disidangkan di Mahmakah Syari'ah hendaklah dilakukan di dalam persidangan tertutup yang dihadiri oleh pihak yang bersangkutan aja. Hal ini dinyatakan di baris terakhir pasal 21 ayat (5) :

"....Yang hendaklah dilakukan dalam Mahkamah tertutup"

Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam pula juga tidak menyebutkan tentang berjalannya proses persidangan secara tertutup tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

V. Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dengan tegas mengatur sanksi terhadap pelaku poligami yang berkawin tanpa mendapat kebenaran Mahkamah terlebih dahulu. Sanksi yang berupa denda dan penjara tersebut boleh diberikan salah satu saja dari hukuman tersebut atau dikenakan kedua-dua sanksi tersebut sekaligus(denda dan penjara). Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 127 UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang keluarga Islam berikut :

"Seseorang lelaki yang semasa perkawinannya yang sedia ada masih berterusan, berkawin lagi di mana-mana jua tempat tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah adalah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya denda dan penjara itu"

Berkenaan dengan sanksi ini, baik Kompilasi Hukum Islam atau PP No. 9 Tahun 1975 ternyata tidak mengatur perkara sanksi dan pidana bagi pelaku poligami yang melanggar ketentuan.

2. **Persyaratan Poligami**

Jika dicermati antara kedua-dua undang-undang poligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dan Kompilasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dari sisi persyaratannya terdapat juga beberapa perbedaan persyaratan yang diinginkan. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut :

a. UU Sarawak Ordinan Undang-undang Keluarga Islam dengan jelas tidak menyatakan perkara yang menjadi persyaratan utama bisa untuk berpoligami. Justeru Kompilasi Hukum Islam meletakkan syarat utama untuk diberikan izin poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak mungkin bisa dipenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Jika diteliti lebih jauh, persyaratan keadilan ini merupakan suatu perkara yang hanya diberikan wewenang kepada Hakim untuk bisa menilai apakah pemohon poligami nantinya akan cenderung berlaku adil atau tidak. Tentunya hal ini berdasarkan kepada pertimbangan yang bijaksana seorang Hakim dalam membuat penilaian. Jadi, kemungkinan untuk bisa beristeri lebih dari satu orang hanya bisa diberikan oleh Pengadilan.[1] Berkenaan dengan persyaratan ini dijelaskan di dalam pasal 55 ayat (2) berikut :

"Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya"

[1]Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*,(Jakarta,Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Di dalam UU Sarawak Ordinan Undang-undang Keluarga Islam selanjutnya menjelaskan bahwa Mahkamah akan memanggil pemohon untuk hadir di persidangan. Turut dihadirkan juga adalah isteri pertama dan kalau ada isteri kedua yang sedia ada juga turut dihadirkan. Begitu juga dengan bakal isteri, wali kepada bakal isteri jika ada termasuk juga orang lain yang menurut pandangan Mahkamah boleh memberikan informasi apa saja berkenaan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan. Pesyaratan ini lebih terperinci dan berbeda dengan ketentuan persyaratan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan ini bisa dilihat di dalam Pasal 21 ayat (5) seperti berikut :

"Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon, isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada, bakal isteri, wali kepada bakal isteri, jika ada, dan mana-mana orang lain yang pada pendapat Mahkamah boleh memberi maklumat berhubungan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu supaya hadir apabila permohonan itu didengar....."

Di dalam Kompilasi Hukum Islam perkara tersebut tidak diatur dengan pasal yang terperinci. Termasuk juga di dalam PP No.9 Tahun 1975 yang menyangkut perkara yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 58 KHI ayat (1 huruf a) dan (2) hanya menjelaskan tentang perkara tersebut seperti berikut :

Ayat (1 Huruf a) berbunyi:

"....Adanya persetujuan isteri"

Dan ayat 2 berbunyi :

"....Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama"

Begitu juga di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41(b)

"Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan".

Jelas bahwa, perbedaan antara ketentuan menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam menerangkan tentang pemanggilan semua isteri yang telah ada termasuk bakal isteri dan walinya untuk hadir di persidangan Mahkamah dan KHI di atas hanya menjelaskan tentang cukup dengan sebuah persetujuan dari isteri pertama. Persetujuan tersebut bisa dalam bentuk lisan atau tertulis saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Alasan Poligami**

UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-undang Keluarga Islam tahun 2001 menyebut tentang ketentuan alasan untuk berpoligami yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Alasan ini diajukan oleh suami dalam suatu bentuk *iqrar* (yaitu pengakuan seorang terhadap sesuatu perkara dan merupakan salah satu keterangan yang diberikan di Mahkamah). Terdapat tiga perkara yang menjadi perbedaan alasan yang harus dikemukakan menurut Ordinan Undang-undang Keluarga Islam di dalam Pasal 5 ayat(a) dengan Kompilasi Hukum Islam. Pertama adalah bersangkutan dengan keuzuran fisik lahiriah. Hal ini bisa saja membawa pengertian seperti anggota fisik sang isteri yang sakit akibat kecelakaan atau apa saja yang menjadikan fisik sang isteri lemah dan tidak berupaya dengan maksimal. Kedua, keadaan sang isteri yang ingkar untuk tidak mahu mematuhi perintah suami untuk berobat bersangkutan dengan penyakit batin agar bisa kembali melakukan hubungan suami isteri. Ketiga adalah isteri atau salah satu isteri menjadi gila. Ketiga-tiga perkara ini yang secara jelas tidak disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun alasan-alasan yang lainnya seperti isteri tidak bisa memberikan keturunan atau di dalam Ordinan Undang-undang Keluarga Islam sebagai kemandulan, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan tersebut adalah sama seperti apa yang disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Daripada keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis perbandingan terhadap "Komparasi Persyaratan Poligami Menurut Ketentuan UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam" maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1) Analisis penulis mendapati bahwa memang terdapat kecenderungan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Bab 43 Tahun 2001 dari satu sisi memuat ketentuan persyaratan yang lebih ketat berbanding Kompilasi Hukum Islam. Hal ini termasuklah sanksi dan denda yang dinilai lebih berat. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang sanksi.

2) *Ketentuan Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan* ketentuan antara UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Persamaan yang dimaksudkan adalah dari sisi persyaratan poligami termasuk juga alasan yang dibolehkan untuk mengajukan permohonan poligami baik di Mahkamah Syariah ataupun di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Terdapat perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk bisa berpoligami menurut UU Sarawak Bab 43 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam. Misalnya ketika pemohon mengajukan permohonan izin poligami, maka suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama secara gabungan. Apabila suami tidak mengajukan permohonan harta bersama bersama pengajuan izin poligami, maka isteri dapat melakukan rekonvensi penetapan harta bersama, sampai tahap jika kedua(suami dan isteri) tidak mengajukan penetapan harta bersama maka permohonan poligami tidak akan diterima. Ketentuan seperti ini tidak disebut dan tidak diatur di dalam UU Sarawak Bab 43 Ordinan UUKI.

4) Persamaan maupun perbedaan ketentuan antara UU Sarawak Bab 43 Ordinan UUKI tahun 2001 dan Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tidak menunjukkan perbedaan yang jauh berbeda. Masing-masing ketentuan undang-undang tersebut cenderung saling melengkapi antara satu dengan yang lain

5) Tidak dinafikan juga bahwa kedapatan pemohon poligami di Sarawak yang sengaja tidak mematuhi ketentuan persyaratan poligami dan mencari jalan alternatif lain dengan melakukan praktek poligami seperti di Indonesia yang dinilai pelaku tidak menyulitkan prosedur serta didukung praktek poligami yang juga menyalahi ketentuan perkawinan di Indonesia. Misalnya poligami lewat "calo". Selain itu terdapat juga upaya dari pelaku poligami yang memalsukan identitas mereka termasuk pemalsuan dokumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asqalani, al. Ibn Hajar, *Fataha al-Bari Bi Syarhi al Bukhari*, Kaherah, Maktabah al Kuliyyat al Azhariyyah, 1978

Ansari, al. Zakariya, *Fathul Wahhab*, juz II, Beirut, Darut Kutub, 2000

Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Quran*, Lahore 1973, n.535, quoted in Asghar Engineer *The Right Of Women In Islam* 1992

Abd.Basir Mohamad dan Mohd. Zain Yahya, *"Isu Syariah Dan Undang-Undang Siri 9"* Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia,(Kuala Lumpur, Cet.I, 2001)

Ali, M. M, *The Religion Of Islam*, terjemahan R. Kaelan C.S, Jakarta, 1977

Aziz,Ahmad, *Islamic Modernism in India and Pakistan* 1857-1964, (New York,1967)

Buku II *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Surabaya, Penerbit Mahkota, Cet V,2001

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1987

Fatimah, Siti, Abdul Rahman *Jurnal IKIM: "Kristeria Poligami dan Alasan Penghakiman"*, vol 7. No II. Juli/Desember (Kuala Lumpur, 1999)

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hassan,Abd Jalil *Perkawinan dalam Islam*,(Kuala Lumpur, Penerbit A.S Noorden)

Ibrahim, Muhammad, *Hasyiyah al Bajuri*, Juz II, Beirut, Darut Kutub, 1999

Jones,Jamilah, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, terjemahan(Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,1996)

Kitab *Sunan Nasa'i*, Bab. *al-Nikah "Karahiyatul Tazwij al-Aqim"*, Juz 10

Katsir, Ibn, *Tafsir al Quranul Adzim*, Tahqiq: Abdul Aziz Ghanim, Muhammad Ahmad Asyur dan Muhammad Ibrahim al- Banna, Kaherah: t.t.

Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, PT. Sinar Grafindo, Jakarta, cet. Pertama, 2008

Muhammad Abduh, *Tarikh*,Vol II,dirujuk oleh Mahmadul Haq, Muhammad Abduh, *A study Of Modern Thinker of Egypt*,(Mesir, Aligarh,1970)

Musfir aj.Jahroni, *Poligami dari Berbagai Persepsi*,(Jakarta :Gema Insani Press,1997)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta :Gunung Agung,1996)

Morsidi,Bin Natsir Artikal "*Biodata dan Sejarah Perkembangan Mahkamah syari'ah Sarawak*"

Nik Badli Syah, Nik Noraini *Marriage and Divorce Under Islamic Law*, Kuala Lumpur, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1998

Nasution,Khoiruddin *"Riba dan Poligami"*,(Yogyakarta,PustakaPelajar,1996)

Nawawi,Imam *al Majmu'*, juz 16, (Beirut, Darul Fikr, 1991)

Ritonga Iskandar, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*,(Jakarta,Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahman, Abd Gazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prana Media, 2003

_____ *Jurnal IKIM: "Poligami Di Malaysia, Peruntukan Dan Pelaksanaan"*,vol 6. No I. Januari/Juni (Kuala Lumpur, 1998)

Sabiq,Sayyid *Fiqhus Sunnah*, Darul Kitab al Arabi,jilid II,(Beirut, Lubnan,1969)

Siddik, Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Penerbit Tintamas, 1983

Soleh, A. Khudori, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Jendela, 2003

Suryabrata, Semardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003

Syata,Muhammad, *'Ianah al Talibin*, juz III, Semarang, Toha Putra, 1995

Syuja', Abu, *al Iqna'*, (Surabaya, Pt.Al Hidayah,1990)

syarwani,Imam, *"Hawasyi al Syarwani*, juz 9, (Beirut, Darut Fikr, 1991

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004

Qurtubi, al.Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, *Al Jami' Liahkami Al Quran al Karim*, Kaherah, Darul Kitab al Arabi, 1967

Qudamah, Ibn, *Al-Irsyad fi Fiqhil Maliky*, (Beirut Darut Kutub,1992)

Zuhaily, Wahbah, *al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*,juz II, Damaskus, Darul Fikr, 1997

----------*al Tafsir al Munir*, Vol I, Beirut Darut Fikr, 1999

Zahrah, Abu Muhammad, *al Ahwal Syakhsiyyah*, Beirut, Maktabah al Ashriyah,1995.

Kamus Dewan Edisi Keempat,Terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamaruddin, Zaleha *"Kamus Istilah Undang-undang Keluarga Islam,* (Kuala Lumpur, Zebra Edition Sdn.Bhd,Cet. I 2002)

Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007, Wacana Intelektual, Cet. I, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id